



Sejumlah Calon Investor KPBU Mundur Sampah di TPST Piyungan 'Overload'

BANTUL (KR) - Kondisi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Sitimulyo, Piyungan, Bantul sudah sangat *overload* (kelebihan kapasitas) dengan volume masuk sekitar 650 ton/hari. Solusi untuk penumpukan sampah tersebut hanya bisa melalui industri dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU ditargetkan bisa beroperasi pada 2022. Namun hingga kini, hal tersebut masih menjadi wacana yang belum ada kejelasannya. Bahkan beberapa calon investor dari sejumlah negara seperti Jepang, China, Swedia dan lainnya, sempat menyatakan minat namun kemudian mundur.

"Kami prihatin karena hingga saat ini belum ada investor yang mau terlibat dalam KPBU. Beberapa calon investor dari luar negeri sudah melakukan peninjauan, tapi kemudian mundur," kata Ketua Komisi C DPRD DIY Arif Setiadi SIP saat melakukan tinjauan lapangan ke TPST Piyungan, Kamis (30/1).

Menurut Arif, perlu ada kejelasan mengapa para calon investor itu mundur, dan upaya untuk mengatasinya. Sebab, operasional KPBU TPST Piyungan membutuhkan persiapan dan perencanaan matang, karena-nya harus ada kepastian sejak sekarang.

***Bersambung hal 6 kol 5**

Sampah Sambungan hal 1

"Pemda DIY juga harus punya *planning* untuk mempersiapkan skenario terburuk, jika pada 2022 KPBU belum terealisasi, sementara saat itu TPST Piyungan sudah tidak bisa menampung sampah lagi," katanya.

Pemda DIY sendiri menjadwalkan proses lelang untuk KPBU TPST Piyungan dilakukan tahun 2020, kemudian pembangunan fisik pada 2021, dan operasional 2022. Lahan baru yang dibutuhkan untuk pengelolaan TPST dengan skema baru ini sekitar 5 hektare. "Sementara lahan baru yang disiapkan Pemda DIY saat ini masih 1,9 hektare, jadi kurang 3,1 hektare lagi," kata Kepala Seksi Pengembangan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Perumahan (PAM-PLP) DIY Edy Suryono ST Meng.

Untuk menuntaskan pengelolaan TPST Piyungan dan persiapan sebelum diserahkan pada investor melalui KPBU, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 120 miliar dalam beberapa tahap dari APBN dan APBD DIY. Untuk tahun anggaran 2020, dialokasikan Rp 14 miliar dari APBD dan Rp 40 miliar dari APBN.

"Anggaran Rp 14 miliar itu untuk talut, pemasangan saluran lindi, saluran air (drainase), dan penyiapan untuk jalan operasional di dalam area TPST," ujar Edy.

Kepala Desa Sitimulyo Juwani mengeluhkan dampak negatif dari penumpukan sampah yang volumenya sudah jauh melebihi kapasitas. Kualitas air di sekitar TPST kini sangat buruk tercemar air lindi, dan bau tidak sedap menyebar hingga melampaui radius lima kilometer.

"Banyak sampah juga masuk di sawah. Masyarakat petani yang seharusnya tinggal panen, gagal karena tercemar lindi. Kami minta jalur lindi dan fasilitas pendukung TPST Piyungan benar-benar diperhatikan, jangan sampai terlambat ditangani. LPJU (lampu penerangan jalan umum) saja sampai sekarang belum terealisasi," keluhannya.

Juwani juga menyoal apakah tidak berjalannya konsep pengurangan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), meski sebenarnya sudah diatur dalam Perda DIY No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hal itu menyebabkan penumpukan sampah yang kian menggunung di TPST Piyungan.

(Bro)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005